
**ENVIRONMENTAL CITIZENSHIP: SPATIAL COMPREHENSION OF
TEACHERS TOWARDS ENVIRONMENTAL ISSUES¹****Udan Kusmawan**

Staf Dosen FKIP Universitas Terbuka, Jakarta

Abstract

This paper acquaints with the idea of Environmental Citizenship. This idea suggests that every human-beings is an integral part of a larger ecosystem. This concept challenges people to acting responsibly and positively toward the Environment. This paper starts with a proposal that citizen is required to connect their understanding of environmental values with national governmental policies via the active participation supporting the quality of the natural environment. This paper cited the results of the researches where issues associated with environmental sustainable development were considered by school teachers. The research has indicated that even though the teachers expressed a clear awareness of the need to be environmentally aware, they did not appreciate the connection between the environment and the broader economic and social aspects of citizenship. Nor did they exhibit an understanding of the interrelated nature of issues from a local to a global perspective.

Konsep *Environmental Citizenship* telah berkembang di negara-negara maju, seperti Canada, Inggris, Amerika, dan Australia. Konsep tersebut menawarkan sebuah prinsip bahwa setiap individu manusia adalah bagian integral dari ekosistem alam semesta, dan karenanya, alam semesta ini dimasa yang akan datang bergantung pada setiap individu manusia. Prinsip tersebut merupakan sebuah tantangan bagi setiap individu agar mampu bersikap, berperilaku dan beraktifitas yang penuh tanggung jawab terhadap lingkungan alam. Inti dari konsep ini adalah himbauan kepada setiap individu untuk berbuat sesuatu yang positif dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-harinya terhadap lingkungan alam sekitarnya, sehingga karenanya akan menjadi warga yang baik. Gagasan *Environmental Citizenship* pertama kalidikembangkan oleh “*the Environment Canada*” yang kemudian dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Dalam kesempatan ini, penulis belum menemukan istilah dalam

bahasa Indonesia yang pas, namun dengan tidak mengurangi makna yang dikandungnya, selanjutnya dalam makalah ini *environmental citizenship* diartikan sebagai kewargaan lingkungan alam semesta yang disingkat dengan “Waliamsta”.

Sebagaimana diketahui bahwa Konsep *Citizenship* (kewarganegaraan) mengandung makna hak, tanggung-jawab, dan implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat tertentu (biasanya kental dengan masyarakat politik) (Waghid, 2005; Westheimer & Kahne, 2003; Winataputra, 2001). *Citizenship* mengandung arti hubungan khusus antara warga dengan sebuah institusi tertentu, termasuk didalamnya sebuah bangunan Negara dan pemerintahan dalam lingkup sosial, ekonomi dan politik. Konsep *citizenship* terbatas pada pengertian ini masih sering diperdebatkan hingga saat ini, dan konsep Waliamsta memberikan kontribusi yang positif terhadap perdebatan tersebut (Cross & Price, 1995; Dobson, 2005; Heater, 2004).

Konsep Waliamsta memberi penekanan yang kuat pada prinsip “partisipasi aktif masyarakat” dalam memahami masalah-masalah lingkungan alam semesta sehingga diharapkan akan bermuara pada pemahaman yang baik dari masyarakat tentang prinsip sustainability atau terbaharukan yang ditujukan untuk alam semesta (Fisher, 2000; Harris, 2004). Konsep dimaksud memperbaiki konsep awal tentang *citizenship* atau kewarganegaraan yang dianggap memberikan pengertian yang kaku tentang hubungan antara warga dengan negara dan lingkungannya sehingga dapat karenanya memperoleh pemahaman yang benar tentang karakteristik permasalahan lingkungan. Pembaharuan ini diyakini akan memperbaiki pemahaman dalam hal hubungan masyarakat dengan pemerintahan atau institusinya (terutama dibidang kebijakan dan politik kaitannya dengan lingkungan hidup) yang mengarah kepada prinsip tata kelola (*governance*), dan bukan semata sebagai produk pemerintahan (*government*).

Environmental citizenship atau Waliamsta bukanlah sebuah konsep baru karena sudah dibahas sejak lama, misalnya dalam deklarasi Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan Manusia (Declaration of the United Nations Conference on the Human

Environment), yang ditetapkan di Stockholm pada tanggal 16 Juni 1972. Secara umum, konsep Waliamsta pada deklarasi ini mengarah pada konsep pelestarian lingkungan alam yang menuntut adanya kesetimbangan dalam hubungan antara manusia dengan alamnya dan antara manusia sebagai warga negara dengan pemerintahannya. Untuk membantu pengertian tersebut, Cogan & Derricott mengusulkan konsep “multidimensional citizenship” sebagai konsep dasar untuk pendidikan lingkungan alam kontemporer (1998, p.117). Konsep tersebut mengandung empat prinsip yaitu “*the need for cultivation of a global/cross-cultural outlook in environmental education, the development of a critical perspective, an emphasis on democratic pedagogies, and improved community collaborations*. Keempat prinsip dari Cogan & Derricott tersebut dijabarkan oleh Kubow, dkk. (1998) menjadi delapan indikasi keberhasilan pendidikan kewarganegaraan, yaitu:

...the ability to look at and approach problems as a member of a global society; the ability to work with others in a cooperative way and to take responsibility to one's roles/duties within society; the ability to understand, accept, appreciate and tolerate cultural differences; the capacity to think in a critical and systemic way; the willingness to resolve conflicts in a non violent manner; the willingness to change one's lifestyles and consumption habits to protect the environment; the ability to be sensitive towards and to defend human rights (e.g. the rights of women, ethnic minorities, etc); and the willingness and ability to participate in politics at local, national and international levels (p. 116).

Berdasarkan penjelasan tersebut tampak bahwa pendidikan berkenaan dengan Waliamsta memiliki tujuan utama, yaitu membantu masyarakat, terutama generasi muda, agar mampu memahami serta menyadari bahwa peristiwa global akan berpengaruh pada setiap individu, dan karenanya menjadi tanggung-jawab setiap individu dan masyarakat untuk memikirkan peristiwa global tersebut. Dengan demikian, pendidikan Waliamsta harus dimulai dengan konsep keterkaitan antar issue global dalam pengetahuan masyarakat global, dan berakhir dengan himbauan partisipasi kepada masyarakat global (Kennedy & Fairbrother, 2004). Waliamsta menginginkan pendekatan

yang holistik dan melibatkan masyarakat global, serta menekankan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan publik berkaitan dengan lingkungan alam, sehingga *sustainability* tidak terbatas kaitannya dengan konsep daur ulang sampah saja atau penghematan dalam menggunakan bahan bakar minyak dan gas bumi, melainkan lebih luas lagi.

Konsep ini pun harus merupakan bagian dari program pemerintah. Lee and So (1999) berpendapat bahwa di Asia, gerakan lingkungan sangat beragam. Ada gerakan yang berlatar-belakang politik, tapi tetap mengatasnamakan kelompok sosial kemasyarakatan. Beberapa gerakan lainnya dilatarbelakangi oleh kepentingan bisnis. Namun demikian, walaupun gerakan lingkungan di Asia berawal dari negeri barat, dikatakan oleh Lee and So bahwa latar belakang nilai-nilai dan kultur sudah menjadi bagian dari gerakan lingkungan di Asia. Kato (2002) mendukung peleburan konsep nilai dan kultur lokal ke dalam konsep Waliamsta tersebut dan menyatakan bahwa pendidikan lingkungan hendaknya menekankan pada pemahaman pertukaran budaya karena terdapat rentang perbedaan budaya yang sangat tinggi dengan dilatarbelakangi oleh beragamnya nilai dan keyakinan budaya setempat kaitannya dengan konsep pelestarian lingkungan alam. Fokus budaya barat pada nilai-nilai individual mungkin tidak akan sepenuhnya dapat diterapkan di Asia dimana nilai-nilai dan norma kelompok masih sangat dijunjung tinggi di sejumlah besar negara di Asia.

Dapat disimpulkan bahwa Waliamsta memberikan nuansa baru dalam hal hubungan antar warga masyarakat serta antara warga dengan pemerintah dimana permasalahan lingkungan dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Konsep ini memadukan isu-isu sosial, politik, dan lingkungan alam. Gagasan Waliamsta menyatakan bahwa warga yang rasional memiliki interest sosial dan perhatian yang besar terhadap isu-isu lingkungan alam secara luas. Lebih luas lagi, konsep ini menyebutkan arti penting dari keterlibatannya secara aktif dari pemerintah dalam mencapai *sustainability*. Pendidikan lingkungan hendaknya memberikan pemahaman yang baik kepada warga terhadap nilai-nilai lingkungan, baik lokal maupun global, baik secara social maupun politik.

Gerakan dunia dalam hal pendidikan lingkungan telah dikaitkan dengan sebuah konsep *Multidimensional Citizenship*. Beberapa pakar, misalnya Cogan & Derricott (1998) and Kubow, Grossman, & Ninomiya (1998) berpendapat bahwa konsep tersebut sangat potensial untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang isu-isu lingkungan global dengan baik, dan keterkaitannya dengan pemahaman ke-lima atribut pendidikan kewarganegaraan yaitu identitas, hak, tanggung-jawab, partisipasi, dan nilai-nilai. Keterkaitan tersebut merupakan perspektif global dari konsep Waliamsta.

Pemahaman Spatial pada Pendidikan Lingkungan

Dalam makalah ini, penulis berasumsi bahwa strategi terbaik dalam mengajarkan pemahaman tentang nilai-nilai lingkungan dan tentang pembangunan yang sustainable adalah dengan cara menekankan kepada siswa untuk aktif berpartisipasi melalui kegiatan yang bertanggung jawab sehingga tercapai masyarakat demokratis yang “sustainable” (Kusmawan, 2007). Oleh karena itu, para pendidik berkewajiban memperkaya proses belajar-mengajarnya dengan nilai-nilai demokratis sehingga para siswanya dapat mempelajari nilai-nilai lingkungan dengan penekanan pada pemahaman yang kuat bahwa apapun usaha yang dilakukan dalam pemenuhan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial tidak seharusnya mengarah kepada konsekuensi yang merugikan bagi manusia itu sendiri, dan tidak seharusnya dengan alasan apapun menurunkan kualitas lingkungan alam dan lingkungan sosial, baik dari lokasi kediaman maupun jauh diluar jangkauan fisik dari tempat kediamannya. Pemahaman spatial sebagai bagian dari konsep multidimensional citizenship tersebut dapat dikembangkan dengan pendekatan mengajar yang berusaha mengenalkan isu-isu lingkungan yang terjadi di lokasi setempat yang dapat meningkatkan pemahaman isu-isu sejenis secara nasional maupun internasional.

Penjelasan diatas mensiratkan tuntutan peranan pembelajaran dalam melakukan perubahan perilaku. Namun, melakukan perubahan perilaku siswa bukanlah pekerjaan yang mudah dan menetapkan faktor-faktor apa saja yang berkontribusi pada perubahan perilaku dimaksud juga tidak mudah. Sebuah teori telah berhasil menjelaskan bagaimana

perubahan perilaku dimaksud bisa terjadi, yaitu *the Theory of Planned Behaviour* (TPB). Hipotesa yang ditetapkan melalui teori tersebut adalah bahwa intension (keinginan untuk bertindak) merupakan indikasi yang baik untuk mengetahui perilaku yang aktual. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin besar keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu akan menjadi indikasi semakin besarnya kecenderungan orang tersebut untuk melakukan sesuatu (Ajzen, 1985; Ajzen & Madden, 1986). Terdapat tiga determinan secara konsep untuk sebuah intention, yaitu – attitude toward the behaviour (kecenderungan sikap untuk berperilaku); the perceived social pressure to perform or not to perform the behaviour (persepsi sosial untuk berperilaku atau tidak berperilaku; and the degree of perceived behavioural control (perceived ease or difficulty of performing the behaviour) (derajat atau intensitas kontrol terhadap perilaku yang telah dipersepsikan) (Ajzen & Driver, 1992).

Memperkenalkan isu-isu lingkungan lokal terkait dengan lingkungan alam semesta akan bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman tentang keterkaitan manusia baik secara emosi maupun fisik terhadap lingkungan alam semesta terlepas dari batasan budaya, etnik, maupun ideology, atau dengan kata lain peningkatan pemahaman spatial (*spatial comprehension*). Jika demikian, maka pendidikan lingkungan akan menjadi sehat, karena akan terjadi relasi yang mutualisme (mutual relationship) antara manusia dan lingkungan fisik setempat, sehingga degradasi kualitas dari lingkungan alam yang disebabkan manusia dapat menurun. Sudut pandang inilah yang menjadi sudut pandang pendidikan lingkungan hidup secara global, yaitu menggunakan contoh isu lokal untuk pemahaman terhadap isu lingkungan global. Pendekatan konsep tersebut hendaknya menjadi ukuran keberhasilan pembangunan suatu negara. Kusmawan, Reynolds and O'Toole (2006) berpendapat bahwa pendekatan konsep tersebut akan membawa konsep pendidikan kewarganegaraan yang bukan hanya berfungsi sebagai instrumen untuk keadilan dan sosial, tetapi juga sebagai sebuah alternatif cara bagi para siswa untuk memahami hak dan tanggung-jawabnya, yaitu berpartisipasi aktif dalam kerangka pemeliharaan lingkungan yang sustainable.

Studi Kasus: Pendidikan lingkungan di Indonesia

Kecenderungan masyarakat di Indonesia dan di negara-negara Asia lainnya untuk mengadopsi budaya dan gaya hidup modern tumbuh sangat pesat. Rahardjo (2007) berpendapat bahwa perubahan gaya hidup setempat sebagai akibat dari kecenderungan tersebut membawa dampak besar pada penurunan kondisi lingkungan alam serta pada derajat ketersingkiran masyarakat dari lingkungan fisik geografisnya. Untuk melihat keterkaitan kasus tersebut dengan pendidikan lingkungan di sekolah, maka dua penelitian telah dilakukan di dua tempat yang berbeda, yaitu di sejumlah SMU di Tasikmalaya, Jawa Barat, yang melingkupi guru dan siswa, dan sejumlah guru sekolah dasar di Tangerang, Banten.

Sebagai bahan informasi, bahwa Tangerang mempunyai kondisi sosial yang berbeda dari Tasikmalaya, dimana Kota Tangerang merupakan kota urban dengan kondisi geografisnya yang berbatasan dengan kota metropolitan Jakarta. Keadaan ini sangat memungkinkan gaya hidup kapital terjadi di kota ini. Pertambahan jumlah pemukiman penduduk sangat tinggi di Kota Tangerang, karena sebagai besar area di Jakarta sudah tidak memungkinkan lagi untuk perumahan penduduk. Masyarakat yang sangat sibuk di kota ini dapat dilihat dari kecenderungan gaya hidup sosial yang semakin individualistik (*self-fulfilment and individual styles of living*). Kasus meningkatnya krisis sosial dan ekonomi semakin tinggi, serta munculnya beberapa jenis penyakit yang disebabkan oleh tidak terpeliharanya saluran pembuangan air, polusi udara, tanah, dan air, seperti gangguan pernafasan dan peradangan di kulit, dsb. Keadaan sebaliknya dapat dilihat di Kota Tasikmalaya. Kondisi sosial dengan kultur yang relatif homogen bernuansa religius islamik. Namun demikian, dengan masuknya pemodal dan peniaga asing, homogenitas sosial dimaksud semakin berkurang di beberapa tempat tertentu, seperti pusat perkotaan. Sejumlah dampak negatif, seperti penumpukan sampah yang tidak terurus dan polusi tanah dan air akibat tidak terurusnya tumpukan sampah tersebut, yang walaupun masih relatif kecil, sudah dapat dirasakan oleh penduduk yang berdomisili di sekitar Kota Tasikmalaya.

Upaya pemecahan secara pragmatis sudah sering dilakukan,

misalnya melalui kegiatan penghijauan hutan gundul oleh pemerintah, penduduk perkotaan dan bahkan sejumlah lembaga swadana masyarakat bekerjasama melakukan kebersihan lingkungan pemukiman penduduk. Namun cara tersebut dinilai kurang berhasil, karena sampai saat ini ternyata tumpukan sampah semakin menggunung dan bahkan di beberapa tempat berserakan tidak terurus, termasuk disaluran-saluran air. Sebuah pemandangan yang kontradiktif dengan lingkungan pemukiman penduduk umum tersebut terjadi di perumahan-perumahan elit real estate. Keadaan di lokasi perumahan elit tersebut tampak sangat tertata termasuk saluran-saluran air, penduduk di lokasi perumahan-perumahan membuang sampah pada tempatnya, dan ada petugas yang membawa sampah-sampah tersebut ke luar dari lokasi perumahan. Sampai di situ seolah-olah nampak bahwa masyarakat perumahan elit memiliki kesadaran yang lebih baik dalam hal kebersihan dan kelestarian lingkungan. Namun apabila dicermati, sebagai contoh petugas kebersihan, mereka membawa sampah ke luar dari lokasi perumahannya dan membuangnya ke tempat-tempat khusus. Seringkali tempat-tempat pembuangan sampah tersebut kurang mendapat penanganan khusus dari pemerintah ataupun petugas kebersihan itu sendiri. Hal ini berarti, perusakan lingkungan oleh sampah tidak berkurang, melainkan hanya berpindah dari perumahan elit ke tempat-tempat tertentu di luar perumahan, seringkali berlokasi di sekitar lokasi pemukiman penduduk umum dan perkampungan.

Contoh kasus tersebut menjadi bukti dari jargon “*Not in my backyard NIMBY*”. Hal ini berarti bahwa inti dari upaya pemecahan terhadap masalah lingkungan alam secara global berkaitan dengan tingkat kesadaran masyarakat yang bersifat spatial (*people’s deliberative spatial consciousness*). Masyarakat lebih peduli pada kesehatan dan kebersihan lingkungan sekitarnya, dengan kurang memperhatikan dampak perilakunya pada lingkungan masyarakat yang lebih luas di luar lingkungan tempat tinggalnya. Kejadian bencana lingkungan di luar tempat pemukimannya tidak banyak disikapi sebagai hal yang mungkin berkaitan dengan kejadian perusakan lingkungan di sekitarnya. Dalam hal ini, pendidikan menjadi sangat penting untuk memfasilitasi proses

pemecahan masalah dalam jangka panjang. Azra (2002) yakin bahwa guru (melalui proses pendidikan) adalah agen penting dalam penyebaran nilai-nilai yang berkaitan dengan citizenship (dan karenanya waliansta).

Pada studi kasus tersebut, survey dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan beberapa hal berikut ini:

- *points of view of the importance of local, national, and worldwide with regard to questions relating to either long term or short term social, political or environmental issues;*
- *techer knowledge of environmental concepts and issues commonly taught in schools;*
- *Their experiences as to whether they have ever been involved, or would consider being involved in efforts to improve the quality of the environment.*
- *Open-ended interviews, further exploring these questions, followed the survey administration for randomly selected participants.*

Secara umum diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal sudut pandang guru terhadap masalah lokal dan global, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Pada umumnya, para guru berada pada tingkatan moderat saja dalam memandang pentingnya pemahaman isu-isu lingkungan secara global kaitannya dengan isu-isu sosial dan ekonomi. Contoh situasi yang dihadapkan kepada para guru adalah “Jika terdapat tuntutan kepadanya untuk lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi ataupun pemenuhan kebutuhan sosial dibandingkan dengan keperluan akan kelestarian lingkungan alam walaupun jika dengan pertumbuhan ekonomi dan sosial tersebut akan berdampak pada pengrusakan lingkungan”. Walaupun secara umum, para guru memandang prioritas yang lebih pada pemeliharaan lingkungan alam, namun, mereka tidak menanggapi situasi tersebut sebagai hal penting yang berbeda antara keadaan di lingkungan tempat tinggalnya, di tingkat nasional, dan di tingkat global.

Paparan singkat pada makalah ini bermuara pada himbauan bahwa pendidikan lingkungan di Indonesia, khususnya, harus mulai menekankan pada peningkatan pemahaman spatial, baik guru maupun siswa, sehingga karenanya diharapkan pola berpikir bangsa dimasa mendatang menjadi

lebih baik. Berpikir mementingkan budaya lokal kaitannya dengan kepentingan ekonomi dan sosial hendaknya dibarengi dengan pertimbangan dampak lingkungan secara global. Karena jika tidak demikian, maka manusia akan semakin tersingkir dari habitatnya bersamaan dengan terjadinya sejumlah fenomena kerusakan alam.

Penutup

Nilai yang ditawarkan melalui pembelajaran *environmental citizenship* (Waliamsta) adalah menjadikan individu manusia sebagai bagian integral dari ekosistem alam semesta, dan karenanya, alam semesta ini dimasa yang akan datang bergantung pada setiap individu manusia. Prinsip tersebut merupakan tantangan bagi setiap individu agar mampu bersikap, berperilaku dan beraktifitas yang penuh tanggung jawab terhadap lingkungan alam. Inti dari konsep tersebut adalah menghimbau setiap manusia untuk berbuat sesuatu yang positif dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-harinya terhadap lingkungan alam sekitarnya, sehingga karenanya akan menjadi warga yang baik.

Sejumlah fakta pada makalah ini menunjukkan bahwa masyarakat masih cenderung berpikir lokal dan kurang memandang penting untuk memahami arti keterkaitan isu-isu lokal dengan dampak yang terjadi secara global. Beberapa contoh dalam makalah ini menjadi bukti dari jargon NIMBY. Keadaan tersebut menunjukkan pentingnya perubahan pola ajar dalam proses pendidikan di sekolah. Pertambahan ilmu pengetahuan sehingga kesadaran untuk memelihara lingkungan alam sekitar saja tidak cukup, melainkan harus dibarengi dengan peningkatan kesadaran individu bahwa perilaku hidupnya akan berkontribusi pada keadaan global. Dalam hal ini, tingkat pemahaman spatial individu perlu ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behaviour. In J. Kuhl and J. Beckmann (Eds.), *Action control: From cognition to behaviour* (pp. 11-39). Heidelberg: Springer.
- Ajzen, I. & Madden, T. J. (1986). Prediction of goal-directed behaviour: Attitudes, intentions, and perceived behavioural control. *Journal of Experimental Social Psychology*, 22, 453-474.

- Ajzen, I. & Driver, B. L. (1992). Application of planned behaviour to leisure choice. *Journal of Leisure Research*, 24(3), 207-224.
- Azra, A. (2002). Paradigma baru pendidikan nasional: Rekonstruksi dan demokratisasi) (translated into New paradigm of national education: Reconstruction and democratization). Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Cogan, J. J. (1998). Citizenship for 21st century: Setting the context. In J. J. Cogan & R. Derricott (Eds.), *Citizenship for 21st century: An International perspective on Education* (pp. 1-20). London: Kogan Page.
- Cogan, J. J., & Derricott, R. (1998). *Citizenship for 21st century: In international perspective on education*. London: Kogan Page.
- Cross, R. T., & Price, R. F. (1995). Education for world citizenship: An ecological necessity? In L. Yates (Ed.), *Citizenship and Education* (pp. 107-123). Melbourne: La Trobe University Press.
- Fischer, F. (2000). *Citizens, experts, and the environment: The politics of local knowledge*. London: Duke University Press.
- Harris, F. (2004). Human-environment interactions. In F. Harris (Ed.), *Global environmental issues* (pp. 3-20). Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
- Heater, D. (2004). *A history of education for citizenship*. London: Routledge Falmer.
- Jones, R. E. & Dunlap, R. E. (1992). The social bases of environmental concern: have they changed over time? *Rural Sociology*, 57(1), 28-47.
- Kalafatis, S. P., Pollard, M., East, R. & Tsogas, M. H. (1999). Green marketing and Ajzen's theory of planned behaviour: a cross market examination. *Journal of Consumer Marketing*, 116(5), 441-460.
- Kubow, P., Grossman, D., & Ninomiya, A. (1998). Multidimensional citizenship: Educational policy for the 21th Century. In J. J. Cogan & R. Darricott (Eds.), *Citizenship for the 21st Century: An international perspective on education* (pp. 115-134). London: Cogan Page Limited.
- Kusmawan, U. (2007). *An analysis of student environmental attitudes and their impact on promoting sustainable environmental citizenship: a multi-site study in Indonesian secondary school*. Unpublished PhD thesis, The University of Newcastle.

- Kusmawan, U., Reynolds, R. & O'Toole, M. (2006). Environmental beliefs and attitudes: An Analysis of Ecological Affinity in Secondary Science Students in Indonesia. Paper presented at the AARE Annual International Education Research Conference, Adelaide, 27 th – 30 th November, 2006.
- Lee, Y. F. & So, A. Y. (1999) (eds). Asia's environmental movements. Comparative perspectives. New York: M.E.Sharpe.
- Rahardjo, B. (2006). Indonesian Lifestyle. Retrieved December 27, 2007. from <http://indonesia.elga.net.id/indoway/index.html>
- Stren, R., White, R., & Whitney, J. (Eds) (1992). Sustainable Cities. Boulder: Westview Press.
- UNEP (1972). Declaration of the United Nations conference on the human environment. Retrieved 26th March, 2008 from: <http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1503>
- UNESCO. (1975). The Belgrade Charter: An international workshop on environmental education. Retrieved February 4, 2007, from <http://portal.unesco.org/education>
- Wahid, Y. (2005). Action as an educational virtue: Towards a different understanding of democratic citizenship education. *Educational Theory*, 55(3), 323-342.
- Westheimer, J., & Kahne, J. (2003). Reconnecting education to democratic: Democratic dialogues. *Phi Delta Kappa*, 85(1), 9-14.
- Winataputra, U. S. (2001). Paradigma pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana sistemik pendidikan demokrasi (translated into Citizenship education paradigm as a systemic vehicle for democratic education). Retrieved November 5, 2005, from http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/45/udin_s_winataputra.htm